



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

LAPORAN KINERJA

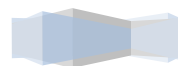
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Yani Km. 4 Kel. Batu Pirng Kec. Paringin Selatan Telp/fax (0526)2029534

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	8
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	12
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Analisis Kinerja.....	17
C. Realisasi Anggaran	30
D. Analisis Efisiensi	36
Bab IV Penutup	39



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2019 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Balangan, Februari 2020

Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Balangan,



HIEZIANI, S.Pt. MH.
NIP. 196310301996031010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PERDA di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. perumusan kebijaksanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah tercapai, yaitu dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, 1 (satu) indikator yaitu Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mendapatkan predikat “Sedang” dengan capaian sasaran sebesar 73,19%. Dan indikator Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil mendapatkan predikat “Sangat Tinggi” dengan capaian sasaran sebesar 99,10.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2019 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan ditahun 2019. Adapun tujuannya adalah pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pertama kali dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dimaksud diatas sebagai berikut :

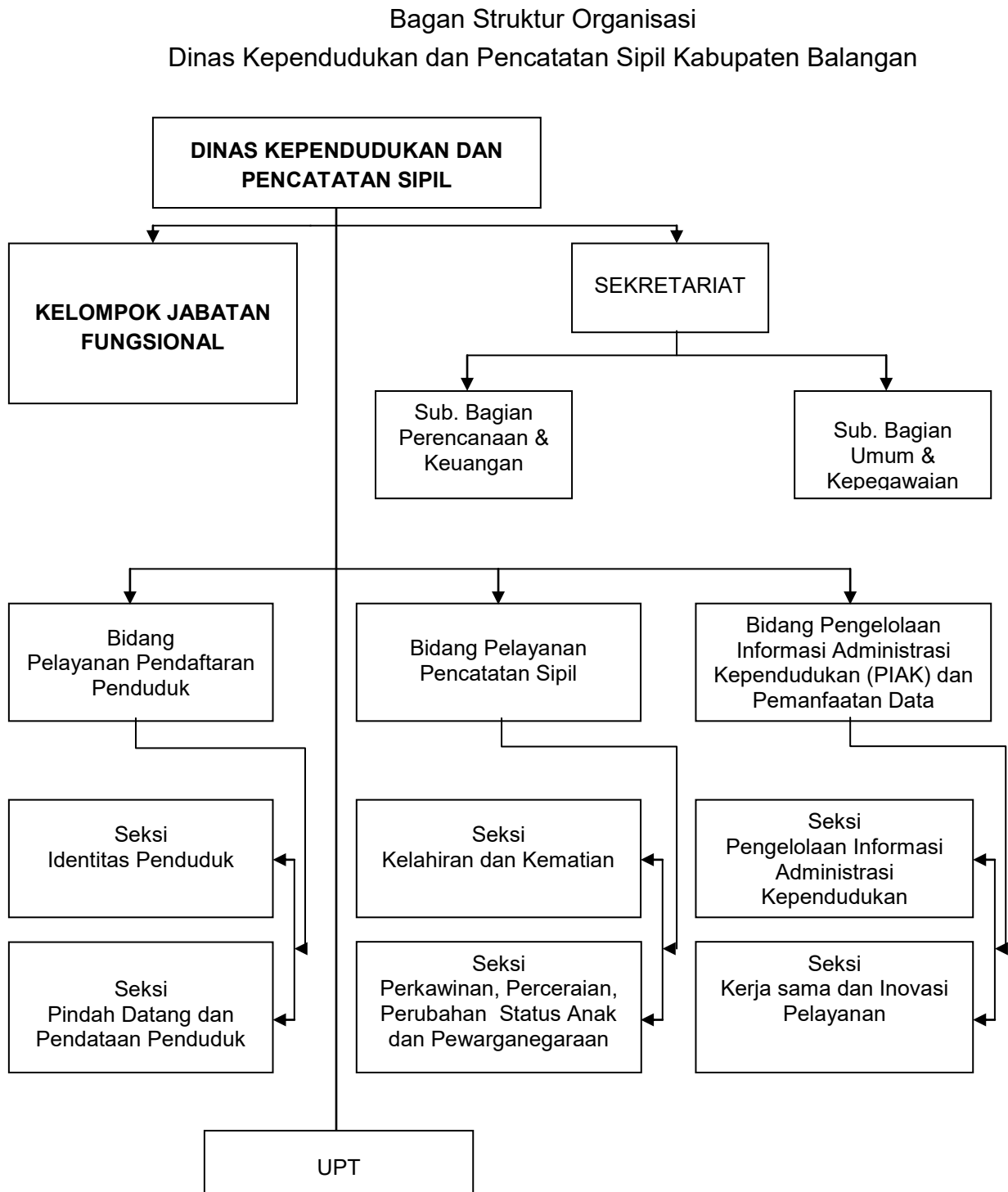
- a. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data;

- b. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil bidang pelayanan pencatatan sipil;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data;
- e. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data;
- g. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Unsur Organisasi Perangkat Daerah



B. Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	88,60%	92%	95%	96%	98%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil	-	B	B	B	A

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	90%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil	B

2. Perjanjian Kinerja Eselon III

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK)	100%
	Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%
	Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	70%
Meningkatnya cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	65%
	Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	100%
	Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan	90%
Meningkatnya pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100%
	Persentase SKPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	24%
	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	4,88%
	Persentase penyajian data kependudukan	100%
	Nilai Rata-rata Tertimbang/ Unsur	3,35

3. Perjanjian Kinerja Eselon IV

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Terlaksananya verifikasi pelayanan Kartu Keluarga	Jumlah permohonan Kartu Keluarga yang diverifikasi	12.000 lembar
Terlaksananya verifikasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	Jumlah permohonan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diverifikasi	8.500 keping
Terlaksananya verifikasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah permohonan Kartu Identitas Anak yang diverifikasi	10.000 keping
Terlaksananya pengadaan blanko dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang tersedia	20.000 buah

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Terlaksananya verifikasi pelayanan dokumen pindah datang penduduk	Jumlah permohonan Surat Pindah Datang yang diverifikasi	3.400 dokumen
Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	5.500 dokumen
Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Kematian	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	1.020 dokumen
Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Perkawinan	Jumlah permohonan Akta Perkawinan yang diverifikasi	200 dokumen
Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	8 kali
Terlaksananya penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data (Buku Profil Kependudukan, Data Agregat Kependudukan, Laporan Semester, Laporan Bulanan, Permintaan Data) yang disajikan	5 jenis
Terlaksananya pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan SIAK	Jumlah jenis pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah menggunakan SIAK	17 jenis
Terlaksananya Survey IKM	Jumlah responden mengikuti survey IKM	500 penduduk
Terciptanya inovasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	6 jenis
Terlaksananya kerjasama dengan SKPD lainnya	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10 SKPD
Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan pada SKPD lainnya	Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	2 SKPD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Skala Nilai Peringkat Kinerja
Kabupaten Balangan Tahun 2019

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Capaian	Kategori
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1. Pengukuran Kinerja Eselon II

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	90%	65,82%	73,13%	Sedang
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil	B (3,35)	B (3,32)	99,10%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					86,12%	Tinggi

2. Pengukuran Kinerja Eselon III

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	97,54%	97,54%	Sangat Tinggi
		Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	70%	10,87%	15,53%	Sangat Rendah
2	Meningkatnya cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	65%	53,32%	82,03%	Tinggi
		Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

		Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan	90%	33,49%	36,91%	Sangat Rendah
3	Meningkatnya pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase SKPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	24%	2,44%	10,17%	Sangat Rendah
		Persentase SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	4,88%	0%	0%	Sangat Rendah
		Persentase penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai Rata-rata Tertimbang/ Unsur	3,35	3,32	99,10%	Sangat Tinggi

3. Pengukuran Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Terlaksananya verifikasi pelayanan kartu keluarga	Jumlah permohonan kartu keluarga yang diverifikasi	12.000 lembar	11.620 Lembar	96,83%	Sangat Tinggi
2	Terlaksananya verifikasi pelayanan kartu Tanda penduduk Elektronik (KTP-el)	Jumlah permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diverifikasi	8.500 keping	8.853 Keping	104,15%	Sangat Tinggi

3	Terlaksananya verifikasi Pelayanan Kartu Tanda Identitas Anak (KIA)	Jumlah permohonan Kartu Identitas Anak yang diverifikasi	10.000 Keping	4.254 Keping	42,54%	Sangat Rendah
4	Terlaksananya pengadaan blanko dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang tersedia	20.000 Buah	20.000 Buah	100%	Sangat Tinggi
5	Terlaksananya verifikasi pelayanan dokumen pindah datang kependudukan	Jumlah permohonan surat pindah datang yang diverifikasi	3.400 Dokumen	2.230 Dokumen	65,59%	Rendah
6	Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	5.500 Dokumen	4.364 Dokumen	79.34%	Tinggi
7	Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Kematian	Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi	1.020 Dokumen	974 Dokumen	95,49%	Sangat Tinggi
8	Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Perkawinan	Jumlah Permohonan Akta Perkawinan yang diverifikasi	200 Dokumen	140 Dokumen	70%	Sedang
9	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	8 Kali	8 Kali	100%	Sangat Tinggi

	kependudukan dan Pencatatan Sipil					
10	Terlaksananya penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data (Buku Profil Kependudukan, daya agregat kependudukan, laporan semester, laporan bulanan, permintaan data) yang disajikan	5 Jenis	5 Jenis	100%	Sangat Tinggi
11	Terlaksananya pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan SIAK	Jumlah jenis pelayanan dokumen kependudukan yang telah menggunakan SIAK	17 Jenis	17 Jenis	100%	Sangat Tinggi
12	Terlaksananya Survey IKM	Jumlah responden mengikuti Survey IKM	500 Penduduk	500 Penduduk	100%	Sangat Tinggi
13	Terciptanya inovasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	6 Jenis	6 Jenis	100%	Sangat Tinggi
14	Terlaksananya kerjasama dengan SKPD lainnya	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10 SKPD	1 SKPD	10%	Sangat Rendah
15	Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan pada SKPD lainnya	Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	2 SKPD	0 SKPD	0%	Sangat Rendah

B. Analisis Kinerja

1. Analisis Kinerja Eselon II

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut 1 (satu) sasaran dinyatakan “**sedang**” dan 1 (satu) sasaran “**sangat tinggi**” dengan capaian rata-rata $\geq 86,12\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

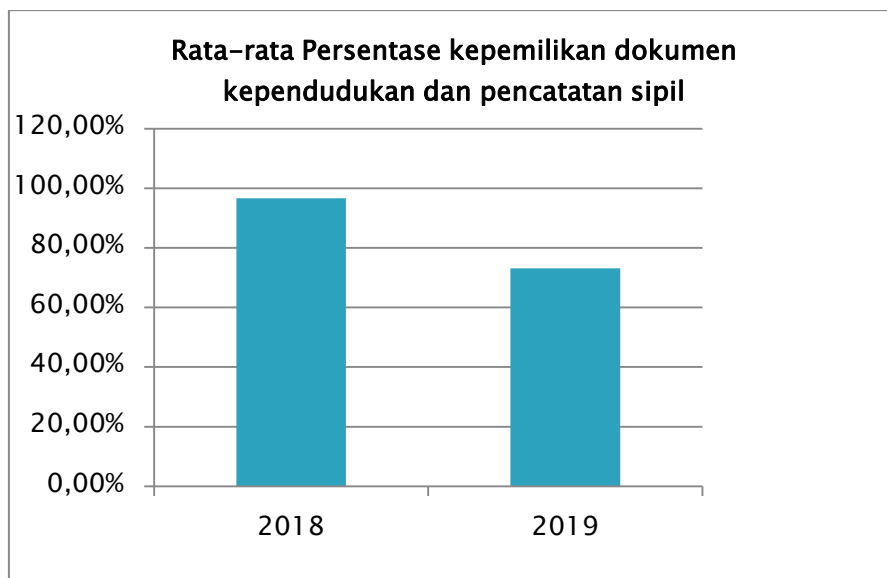
Indikator	2018	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96,64%	90%	65,82%	73,13%	67,16%
Rata-rata Capaian				73,13% (sedang)	

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil” pada tahun 2019 sebesar 65,82% dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 73,13%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Sedang**.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2018, Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun ini mengalami penurunan sekitar 23,51%. Hal ini disebabkan karena adanya revisi indikator kinerja yang menyebabkan bertambahnya dokumen yang menjadi acuan perhitungan yang sebelumnya ada 5 indikator sekarang bertambah menjadi 6 indikator sehingga

pembagiannya menjadi lebih besar sedangkan capaian kinerja dari indikator tersebut masih rendah (cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak).

Grafik Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 & 2019



Capaian ini dapat dijabarkan kedalam masing-masing dokumen yang menjadi acuan perhitungan yaitu :

- ❖ Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Nasional sebesar 100%. Perhitungan ini diperoleh dari data konsolidasi bersih bahwa sebanyak 41.217 Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Balangan semuanya sudah tercatat pernah melakukan pencetakan Kartu Keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini diantaranya adalah jumlah penduduk Kabupaten Balangan yang terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Kalimantan Selatan sehingga lebih memudahkan dalam pencapaian targetnya. Selain itu proses penerbitan Kartu Keluarga yang terbilang cepat (sehari selesai) juga dianggap sebagai pendorong dalam pencapaian target tersebut. Kecepatan dalam proses penerbitan Kartu Keluarga ini tentunya tidak lepas dari peralihan proses penandatanganan dokumen kependudukan dari tanda tangan basah menjadi Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Permasalahan dan hambatan yang biasanya muncul dari pencapaian indikator ini antara lain Kartu Keluarga yang sudah tercetak kadang-kadang ada yang belum diambil oleh pemohon. Hal ini tentu berdampak pada persepsi bahwa secara fisik pemohon belum mempunyai Kartu Keluarga sedangkan secara

sistem telah memiliki Kartu Keluarga. Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam database kependudukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan Kartu Keluarga baru dengan alasan belum terdaftar sebanyak 95 berkas pada tahun 2019.

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang timbul selama ini adalah dilakukannya verifikasi yang ketat terhadap berkas permohonan KK baru dengan alasan belum terdaftar baik itu pada database lokal maupun pada database konsolidasi pusat. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya data ganda di kemudian hari. Selain itu, pelayanan ke daerah terpencil tentu akan sangat membantu bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil yang benar-benar belum memiliki dokumen kependudukan.

Berikut data kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Balangan pada Tahun 2019 :

Tabel I
Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019

No.	Kecamatan	Kepala Keluarga	KK memiliki Kartu Keluarga	Persentase
1	Juai	5.385	5.385	100%
2	Halong	6.360	6.360	100%
3	Awayan	4.497	4.497	100%
4	Batumandi	6.103	6.103	100%
5	Lampihong	5.938	5.938	100%
6	Paringin	6.086	6.086	100%
7	Paringin Selatan	4.684	4.684	100%
8	Tebing Tinggi	2.164	2.164	100%
Total		41.217	41.217	100%

- ❖ Cakupan kepemilikan KTP elektronik sebesar 97,54%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan wajib KTP dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik yaitu 89.820 jiwa dari 92.085 wajib KTP telah melakukan perekaman data KTP elektronik.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini hampir sama dengan faktor keberhasilan kepemilikan Kartu Keluarga, yaitu jumlah penduduk yang terbilang masih sedikit. Selain itu, pelayanan perekaman keliling KTP-el dengan slogan “hati unda (hanyar tilpun, ulun datang)” dianggap mampu membantu masyarakat khususnya para manula dan disabilitas yang tidak dapat mendatangi tempat perekaman untuk mendapatkan hak yang sama yaitu memiliki dokumen kependudukan. Perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah bagi siswa sebagai wajib KTP pemula juga merupakan langkah yang diyakini dapat membantu para wajib pemula untuk memperoleh KTP-el.

Permasalahan dan hambatan yang hambatan yang muncul adalah kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Dalam hal ingin melakukan pelayanan keliling, terpaksa pelayanan reguler di kantor akan terganggu mengingat terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Selain itu, adanya penduduk yang merantau ke daerah lain juga merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya target. Walaupun secara sistem sudah mengakomodir adanya rekam cetak luar domisili, namun kurangnya sosialisasi membuat masyarakat yang merantau tidak dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumberdaya manusia khususnya operator perekaman dan pencetakan KTP elektronik sehingga pelayanan reguler dan pelayanan keliling dapat berjalan beriringan dengan lancar. Berikut data kepemilikan KTP-el di Kabupaten Balangan Tahun 2019 :



Tabel II
Data Kepemilikan KTP-elektronik Kabupaten Balangan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP		JUMLAH	SUDAH MEREKAM	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	JUAI	6.073	5.995	12.068	11.768	97,51
2	HALONG	7.404	7.002	14.406	13.935	96,73
3	AWAYAN	4.931	5.000	9.931	9.668	97,35
4	BATUMANDI	6.881	6.754	13.635	13.300	97,54
5	LAMPIHONG	6.690	6.731	13.421	13.083	97,48
6	PARINGIN	6.655	6.764	13.419	13.194	98,32
7	PARINGIN SELATAN	5.096	5.208	10.304	10.160	98,60
8	TEBING TINGGI	2.461	2.440	4.901	4.712	96,14
TOTAL		46.191	45.894	92.085	89.820	97,54

- ❖ Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 10,87%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan wajib KIA dengan jumlah anak yang telah melakukan perekaman data KIA yaitu dari 39.149 wajib KIA sebanyak 4.254 anak telah melakukan perekaman data KIA.

Indikator kinerja ini tidak dapat dikatakan berhasil mengingat prosentase capaian realisasinya hanya sebesar 15,53%, dimana dari penduduk wajib KIA yang ditargetnya 70% diantaranya memiliki KIA, sampai akhir tahun 2019 hanya 10,87% saja yang telah memiliki KIA.

Permasalahan yang dihadapi tentu saja belum adanya operator untuk pencetakan KIA. Dengan terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki, tentu saja harus dikelola seoptimal mungkin supaya program penerapan KIA di Kabupaten Balangan dapat berjalan. Namun pengelolaan sumberdaya manusia ternyata tidak cukup untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumberdaya manusia khususnya petugas verifikator dan pencetakan KIA dengan porsi yang cukup jika ingin memenuhi target indikator yang ditetapkan. Berikut data kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019

Tabel III
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Balangan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	WAJIB KIA		JUMLAH	SUDAH MEREKAM	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	JUAI	2.598	2.506	5.104	509	9,97
2	HALONG	3.238	3.090	6.328	485	7,66
3	AWAYAN	2.142	2.029	4.171	523	12,54
4	BATUMANDI	2.899	2.605	5.504	373	6,78
5	LAMPIHONG	2.837	2.520	5.357	730	13,63
6	PARINGIN	2.942	2.783	5.725	808	14,11
7	PARINGIN SELATAN	2.419	2.210	4.629	761	16,44
8	TEBING TINGGI	1.156	1.175	2.331	65	2,79
TOTAL		20.231	18.918	39.149	4.254	10,87

- ❖ Cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebesar 53,32%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan jumlah penduduk memiliki Akta Kelahiran dengan total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Balangan. Yaitu dari 131.234 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 69.970 penduduk telah memiliki Akta Kelahiran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini yang utama adalah mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dilaksanakan sosialisasi di Kecamatan dan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Anggota PKK serta Bidan desa yang mengikuti sosialisasi tersebut untuk menyampaikan kembali informasi yang diterima kepada warganya.

Masyarakat semakin sadar untuk membuat Akta Kelahiran baik untuk dirinya sendiri, keluarga dan anak-anak yang diperlukan sebagai syarat masuk sekolah. Hal ini dapat dilihat dari laporan data agregat pada bulan desember tahun 2019 sebanyak 54% yang memiliki Akta Kelahiran secara umum dan 93% untuk Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun. Selain itu pula dilakukannya layanan langsung pencatatan kelahiran ditempat (jemput bola) menambah keinginan masyarakat

untuk membuat Akta Kelahiran karena tanpa repot datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adanya Permendagri No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir, yang mengatur untuk surat keterangan lahir bila tidak terpenuhi dapat diganti menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran, dapat diisi oleh ibu kandung, orang tua atau dirinya sendiri sebagai subjek Akta. Orang tua yang tidak memiliki buku nikah tetapi di Kartu Keluarga terlanjur status sebagai pasangan suami isteri yang perkawinannya belum tercatat, dapat menggunakan SPTJM kebenaran pasangan suami isteri sebagai pengganti buku nikah.

Adanya kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama , Kemenag dan Dukcapil untuk pelayanan bersama, sehingga anak yang lahir sebagai anak seorang ibu dapat dilakukan pengesahan anak sebagai anak pasangan suami isteri. Kecepatan dalam proses penerbitan Akta Kelahiran tidak terlepas dari peralihan proses penandatanganan dokumen pencatatan sipil dari tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektronik (TTE).

Permasalahan dan hambatan yang muncul dari pencapaian indikator ini antara lain masih banyak Akta Kelahiran terbitan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum berdirinya Kabupaten Balangan, yang belum terigister pada database kependudukan dan data SIAK Dukcapil Kabupaten Balangan, sehingga terdata belum memiliki Akta lahir padahal sebagian besar sudah memilikinya.

Belum maksimalnya layanan langsung ditempat (Jemput bola) karena terbatasnya sarana dan prasarana dan personil antara petugas pelayanan di kantor dan turun langsung kelapangan. Jarak yang cukup jauh ditempuh sehingga perlu waktu khusus untuk mengadakan layanan langsung di daerah terpencil.

Terbatasnya jaringan dan sumber daya manusia yang bisa untuk melakukan pencatatan kelahiran secara on line, sehingga sampai hari ini belum ada masyarakat yang mengurus secara on line.

Belum adanya kerjasama dengan pihak terkait (Dinas Kesehatan) untuk melakukan pencatatan kelahiran secara langsung di tempat persalinan (RSUD Kab. Balangan).

Solusi pemecahan masalah tersebut adalah dengan membuat surat edaran atau pemberitahuan untuk membuat Akta Kelahiran terutama untuk anak usia 0-18 tahun dan dihimbau juga untuk yang dewasa, mengumpulkan fotocopy Akta Kelahiran terbitan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Akta Kelahiran yang tahun terbitan sebelum ada data SIAK (Tahun 2011 sampai ketahun sebelumnya).

Menambah petugas atau sumberdaya manusia untuk dapat melaksanakan layanan langsung pencatatan kelahiran baik ditempat persalinanan(RSUD) ataupun di Kecamatan dan di Desa.

Perlunya membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran dan kecepatan proses pencatatan kelahiran.

Berikut data kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Balangan Tahun 2019 :

Tabel IV
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			PENDUDUK MEMILIKI AKTA			%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	JUAI	8.671	8.501	17.172	4.682	4.426	9.108	53,04
2	HALONG	10.642	10.092	20.734	5.326	4.998	10.324	49,79
3	AWAYAN	7.073	7.029	14.102	3.834	3.594	7.428	52,67
4	BATUMANDI	9.780	9.359	19.139	5.311	5.005	10.316	53,90
5	LAMPIHONG	9.527	9.251	18.778	5.263	4.847	10.110	53,84
6	PARINGIN	9.597	9.547	19.144	5.101	4.852	9.953	51,99
7	PARINGIN SELATAN	7.515	7.418	14.933	4.346	4.093	8.439	56,51
8	TEBING TINGGI	3.617	3.615	7.232	2.193	2.099	4.292	59,35
TOTAL		66.422	64.812	131.234	36.056	33.914	69.970	53,32

- ❖ Cakupan penerbitan Akta Kematian sebesar 100%. Data ini berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan akta kematian yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2019 yaitu sebanyak 974 berkas dan semuanya telah diterbitkan akta kematiannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan mencatatkan kematian anggota keluarganya. Hal ini dapat dilihat semakin tahun semakin banyak jumlah Akta Kematian yang diterbitkan baik yang baru saja meninggal di tahun tersebut atau Akta Kematian yang baru saja dilaporkan karena masih ada

datanya di Kartu Keluarga sedangkan keberadaan orang tersebut sudah tidak ada lagi. Pentingnya Akta Kematian untuk mengurus Asuransi, Taspen dll, yang sangat diperlukan oleh ahli waris sebagai bukti kebenaran kematian tersebut. Selain itu pula adanya pemberian santunan untuk kematian dari Pemerintah Daerah yang baru saja terjadi (maksimal tiga bulan setelah kematian) hal ini menarik minat masyarakat untuk segera mencatatkan kematian keluarganya tersebut.

Permasalahan dan hambatan yang muncul adalah belum maksimalnya ditingkat desa untuk melaporkan kematian yang sudah lama dan masih tercantum datanya pada kartu keluarga. Karena tidak ada pembandingan antara jumlah yang meninggal dengan jumlah kepemilikan Akta Kematian maka cakupan akta kematian ini dapat dikatakan 100% .

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlunya kerjasama ditingkat kecamatan dan desa untuk melaporkan penduduk yang sudah lama meninggal agar dibuatkan Akta Kematian tersebut.

Berikut data penerbitan dokumen Akta Kematian Kabupaten Balangan Tahun 2019 :

Tabel V
Data Penerbitan Akta Kematian Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Juai	116
2	Halong	122
3	Awayan	140
4	Batumandi	151
5	Lampihong	173
6	Paringin	121
7	Paringin Selatan	95
8	Tebing Tinggi	56
Balangan		974

- ❖ Cakupan penerbitan akta perkawinan sebesar 33,22%. Hasil ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah penduduk Non Muslim yang sudah memiliki Akta Perkawinan sebanyak 3.381 jiwa dibagi seluruh penduduk Non Muslim yang sudah kawin sebanyak 1.090 jiwa.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun bila di lihat dari Target kinerja sebesar 90 % , terealisasi sebesar 33,22% dari jumlah penduduk status kawin yang memiliki Akta Perkawinan, masih jauh dari target.

Permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pencatatan perkawinan penduduk antara lain masih ada perkawinan beda agama sehingga masyarakat harus melakukan Putusan Pengadilan Negeri dulu baru bisa dicatatkan akan tetapi warga terkadang enggan untuk melakukannya. Masih ada perkawinan secara adat yang belum diakui secara Negara sehingga tidak bisa dicatatkan. Pada saat melangsungkan perkawinan, usia pasangan tersebut masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan, semestinya Laki-laki usia 19 tahun dan Perempuan 16 tahun. Sehingga terkendala dalam mencatatkannya karena harus ijin orang tua atau dispensasi melalui Putusan Pengadilan Negeri.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan antara lain, perlunya kerjasama dengan pihak terkait, aparat desa, tokoh adat dan agama untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara agama yang diakui dan tercatat oleh negara. Berikut data penerbitan dokumen Akta Perkawinan Kabupaten Balangan Tahun 2019 :

Tabel VI
Data Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Memiliki Akta		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juai	6	5	11
2	Halong	378	373	751
3	Awayan	-	-	-
4	Batumandi	2	2	4
5	Lampihong	-	-	-
6	Paringin	15	17	32
7	Paringin Selatan	10	10	20
8	Tebing Tinggi	137	135	272
Jumlah		548	542	1.090

Sasaran 2

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2018	2019			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil	B (3,07)	B (3,35)	B (3,32)	99,10%	-
Rata-rata Capaian				99,10% (Sangat Tinggi)	

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil” pada tahun 2019 sebesar 3,32 atau masuk dalam kategori B. dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 99,10%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dipersepsikan **Baik** oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan pada penilaian di semester II tahun 2019 adalah **82,98** berada pada interval **76,61 – 88,30** dengan Mutu Pelayanan **B** dan Kinerja Unit Pelayanan pada kategori **Baik**. Semua unsur menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata indeks 3,39. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan BAIK.

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut dapat disajikan uraian sebagai berikut :

1. Dilihat dari Nilai rata-rata per unsur, unsur yang memiliki nilai paling rendah adalah unsur waktu penyelesaian pelayanan dibandingkan dengan nilai unsur yang lain, dimana pada unsur ini, responden diminta pendapatnya tentang

kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Dengan nilai unsur 3.064, unsur waktu penyelesaian pelayanan masuk dalam kategori Kurang Baik. Hal ini menunjukkan pengguna jasa layanan menganggap penyelesaian pelayanan masih lambat.

2. Masih kurang lengkapnya fasilitas yang lebih membuat aman dan nyaman pengguna jasa layanan.
3. Masih perlunya penambahan informasi tentang prosedur, syarat dan waktu penyelesaian yang mudah terlihat dan mudah dimengerti.
4. Masalah masyarakat (responden) kurang respek/ tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak objektif).
5. Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei IKM, hal ini dapat terlihat ada beberapa masyarakat yang ketika diberikan lembar kuisisioner, menolak untuk mengisi dengan berbagai alasan.

Beberapa alternatif pemecahan masalah guna menjawab tuntutan akan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diantaranya :

1. Menganalisa kembali alur prosedur penerbitan masing-masing Dokumen Kependudukan dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi waktu dan persyaratan yang murah dan mudah namun tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan koordinasi yang baik antar masing-masing unit pelayanan. Selain itu, perlunya diberikan informasi yang jelas baik melalui lisan ataupun media informasi lainnya tentang waktu maksimum penyelesaian yang diperlukan dalam proses penerbitan masing-masing Dokumen Kependudukan untuk menghindari penilaian negatif pada petugas.
2. Penambahan fasilitas umum demi keamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan dan menciptakan pelayanan publik yang responsif, seperti :
 - Adanya petugas dan tempat parkir yang teduh.
 - Ruang ramah ibu dan anak seperti ruang menyusui dan ruang bermain untuk anak. Pengadaan fasilitas seperti ini setidaknya membantu terpenuhinya hak-hak anak, manakala orangtuanya sedang menjalani

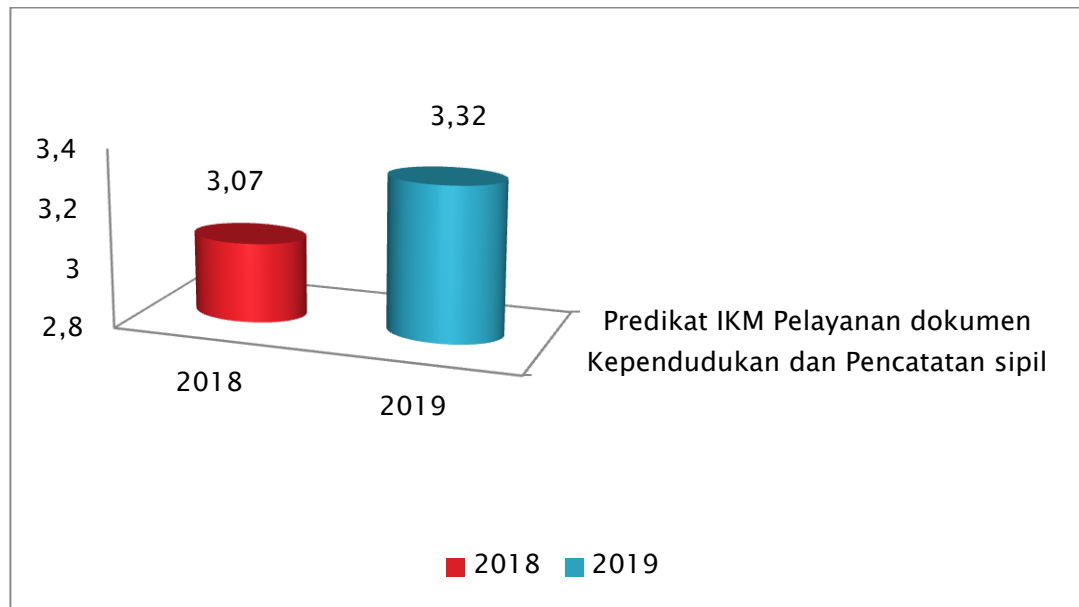
berbagai proses pengurusan dari pelayanan serta dapat menjaga suasana yang kondusif sebagai hiburan penghilang kebosanan bagi anak.

- Penambahan tempat duduk yang nyaman dan mampu menampung seluruh pengunjung untuk menghindari masih adanya pengunjung yang tidak mendapatkan tempat duduk.
 - Menempatkan pengharum ruangan agar ruang pelayanan terhindar dari bau yang tidak sedap dan memberikan efek aroma therapy bagi pengunjung.
 - Menyediakan air mineral/ kudapan gratis sebagai salah satu bentuk kepedulian unit penyelenggara pelayanan bagi pengguna jasa layanan saat menunggu proses penyelesaian pelayanan.
3. Menampilkan informasi mengenai alur prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan berikut jam pelayanan dengan bahasa yang informatif dan mudah dimengerti serta ditempatkan diposisi yang strategis hingga memudahkan pengunjung melihat dan membacanya.
 4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima layanan.
 5. Perlunya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik disemua sektor untuk terus menerus meningkatkan kemampuan, keterampilan, kenyamanan, keamanan dan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung dan mau serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.
 6. Peningkatan sumberdaya manusia melalui seminar, pelatihan dan diklat teknis lainnya tentang pelayanan publik dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.

Dibandingkan dengan capaian semester II tahun 2018, realisasi Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun ini mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,25.



Grafik Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 dan 2019



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.936.626.631,- atau 90,34% dari pagu sebesar Rp. 6.571.237.012,-.

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran 2019 (Rp.)	Realisasi Anggaran 2019 (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.052.288.012,-	2.719.308.999,-	89,09
2.	Belanja Langsung	3.518.949.000,-	3.217.317.632,-	91,43
	Total	6.571.237.012,-	5.936.626.631,-	90,34

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu sebesar 91,43%. Sementara penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu 81,84 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	80,01%	1.290.115.500,-	1.208.452.038,-	91,43%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	99,10%	511.440.000,-,-	418.541.814,-	81,84%
Total		1.801.555.500,-	1.626993.852,-	90,31%

Rincian capaian kinerja

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rata- rata Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
Sasaran 1 : Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil					
I	Program : Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	73,41	224.666.500,-	189.433.500,-	84,32
1.	Kegiatan : Pelayanan penerbitan identitas penduduk	81,22	153.020.000,-	119.215.000,-	77,91
2.	Kegiatan : Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	65,59	71.646.500,-	70.218.500,-	98,01
II	Program : Program Pelayanan Pencatatan Sipil	88,02	164.500.000,-	154.708.636,-	94,05

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rata- rata Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
3.	Kegiatan : Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	106,04	148.670.000,-	139.278.636,-	93,68
4.	Kegiatan : Pelayanan pencatatan perkawinan, perubahan status anak dan pewarganegaraan	70	15.830.000,-	15.430.000,-	97,47
III	Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan	98,09	900.949.000,-	864.309.902,-	95,93
5.	Kegiatan : Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	100	305.738.000,-	300.882.500,-	98,41
6.	Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	100	154.305.000,-	141.030.000,-	91,40
7.	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	100	120.960.000,-	102.725.000,-	84,92
8.	Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	92,36	319.946.000,-	319.672.402,-	99,91
Capaian realisasi anggaran		80,01	1.290.115.500,-	1.208.452.038,-	91,43

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rata- rata Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
IV	Program : Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	99,10	511.440.000,-	418.541.814,-	81,84
9.	Kegiatan : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	100	511.440.000,-	418.541.814,-	81,84
Capaian realisasi anggaran		99,10	511.440.000,-	418.541.814,-	81,84
Sekretariat					
V	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	867.600.650,-	823.101.522,-	94,87
10.	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	123.600.000,-	88.400.826,-	71,52
11.	Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	65.050.000	61.450.000	94,47
12.	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	29.082.000	29.081.000	100,00
13.	Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100	7.000.000	6.830.000	97,57
14.	Kegiatan : Penyediaan alat tuis kantor	100	34.791.650,0	34.791.000	100,00
15.	Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	14.243.000	14.221.500	99,85

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rata- rata Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
16.	Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100	28.906.000	28.889.000	99,94
17.	Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	25.450.000	22.544.500	88,58
18.	Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100	5.400.000	3.125.000	57,87
19.	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	100	14.000.000	14.000.000	100,00
20.	Kegiatan : Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45,81	478.478.000,0	478.368.698	99,98
21.	Kegiatan : Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	109,23	41.600.000	41.400.000	99,52
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	683.907.600,-	601.977.008,-	88,02
22.	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	100	150.000.000	149.520.000	99,68
23.	Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100	125.950.000	113.750.000	90,31
24.	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	9.500.000	9.470.000	99,68
25.	Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	100	7.500.000	7.500.000	100,00

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rata- rata Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
26.	Kegiatan : Pengadaan Komputer	100	102.869.600	94.137.636	91,51
27.	Kegiatan : Pengadaan alat- alat studio	100	8.000.000	7.850.000	98,13
28.	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	238.188.000	177.999.372	74,73
29.	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	41.900.000	41.750.000	99,64
VII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	55.900.000,-	55.260.000,-	98,86
30.	Kegiatan : Pengadaan pakaian kerja lapangan	100	55.900.000,-	55.260.000,-	98,86
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	92.000.000,-	92.000.000,-	100
31.	Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	100	92.000.000,-	92.000.000,-	100,00
IX	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	17.985.250,-	17.985.250,-	100
32.	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	1.989.250,0	1.989.250	100,00

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rata- rata Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
34.	Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	1.090.000,0	1.090.000	100,00
35.	Kegiatan : Penyusunan RKA dan DPA SKPD	100	1.010.000,0	1.010.000	100,00
36.	Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	100	13.025.000,0	13.025.000	100,00
Capaian Realisasi Anggaran		100	1.717.393.500,-	1.590.323.780,-	92,60
Total			3.518.949.000,-	3.217.317.632,-	91,43

D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
I	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	94,87	105,41
1	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	71,52	139,82
2	Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	94,47	105,85
3	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	100,00	100,00
4	Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100	97,57	102,49
5	Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	100	100,00	100,00
6	Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	99,85	100,15
7	Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100	99,94	100,06
8	Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	88,58	112,89
9	Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	57,87	172,80

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
10	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	100	100,00	100,00
11	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45,81	99,98	45,82
12	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	109,23	99,52	109,76
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	88,02	113,61
13	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	100	99,68	100,32
14	Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100	90,31	110,73
15	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	99,68	100,32
16	Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	100	100,00	100,00
17	Kegiatan : Pengadaan Komputer	100	91,51	109,28
18	Kegiatan : Pengadaan alat-alat studio	100	98,13	101,91
19	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	74,73	133,82
20	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	99,64	100,36
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	98,86	101,15
21	Kegiatan : Pengadaan pakaian kerja lapangan	100	81,84	122,19
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100
22	Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	100	100
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100
23	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100,00	100,00
24	Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran	100	100,00	100,00
25	Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	100,00	100,00
26	Kegiatan : Penyusunan RKA dan DPA SKPD	100	100,00	100,00

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
27	Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	100	100,00	100,00
VI	Program : Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	73,41	84,32	87,06
28	Kegiatan : Pelayanan penerbitan identitas penduduk	81,22	77,91	104,25
29	Kegiatan : Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	65,59	98,01	66,92
VII	Program : Program Pelayanan Pencatatan Sipil	88,02	94,05	93,59
30	Kegiatan : Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	106,04	93,68	113,19
31	Kegiatan : Pelayanan pencatatan perkawinan, perubahan status anak dan kewarganegaraan	70	97,47	71,82
VIII	Program : Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	99,10	81,84	121,09
32	Kegiatan : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	100	81,84	122,19
IX	Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan	98,09	95,93	102,25
33	Kegiatan : Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	100	98,41	101,62
34	Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	100	91,40	109,41
35	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	100	84,92	117,76
36	Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	92,36	99,91	92,44

Di bandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2019 ini, maka realisasi anggaran sebesar 90,34 % dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 91,90 % menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana.



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah dicapai yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, 1 (satu) indikator dinyatakan “**sedang**” dan 1 (satu) indikator “**sangat tinggi**” dengan capaian rata-rata $\geq 86,15\%$ dari target.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Namun demikian, untuk tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tetap berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Membangun tim yang solid yang dapat menjalankan tupoksi masing-masing dengan baik.
2. Penyelarasan program dan kegiatan dari masing-masing bidang sehingga dapat berjalan beriringan.
3. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelayanan.
4. Menciptakan lingkungan pelayanan yang ramah dan nyaman sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri.
5. Lebih mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait.
6. Terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
7. Menciptakan terobosan-terobosan inovasi pelayanan.
8. Meningkatkan kapasitas aparatur.
9. Terus melakukan pelayanan keliling untuk menjangkau penduduk rentan administrasi kependudukan.
10. dll.



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	90%	65.82%	73.13
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B (3,35)	B (3,32)	99.10
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK)	100%	100.00%	100.00
		Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	97,54%	97,54
		Persentase penduduk memiliki dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	70%	10,87%	15,53
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	65%	53,32%	82,03
		Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	100%	100.00%	100.00
		Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan	90%	33.22%	36.91
3.	Meningkatnya pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100%	100%	100.00
		Persentase SKPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	24%	1%	4.10
		Persentase SKPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	4.88%	0%	0.00
		Persentase penyajian data kependudukan	100%	100%	100.00
4	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Persentase inovasi pelayanan	100%	100%	100.00

		Nilai rata-rata tertimbang/ unsur	3,35	3.32	99.10
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya verifikasi pelayanan Kartu Keluarga	Jumlah permohonan Kartu Keluarga yang diverifikasi	12.000 lembar	11.620 lembar	96.83
2	Terlaksananya verifikasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Jumlah permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diverifikasi	8.500 keping	8.853 keping	104.15
3	Terlaksananya verifikasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah permohonan Kartu Identitas Anak yang diverifikasi	10.000 keping	4.254 keping	42.54
4	Terlaksananya pengadaan blanko dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang tersedia	20.000 buah	20.000 buah	100.00
5	Terlaksananya verifikasi pelayanan dokumen pindah datang penduduk	Jumlah permohonan Surat Pindah Datang yang diverifikasi	3.400 dokumen	2.230 dokumen	65.59
6	Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	5.500 dokumen	4.364 dokumen	79.35
7	Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Kematian	Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi	1.020 dokumen	974 dokumen	95.49
8	Terlaksananya verifikasi pelayanan penerbitan Akta Perkawinan	Jumlah permohonan Akta Perkawinan yang diverifikasi	200 dokumen	140 dokumen	70.00
9	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	8 kali	8 kali	100.00
10	Terlaksananya penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data (Buku Profil Kependudukan, data agregat kependudukan, laporan semester, laporan bulanan, permintaan data) yang disajikan	5 jenis	5 jenis	100.00
11	Terlaksananya pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan SIAK	Jumlah jenis pelayanan dokumen kependudukan yang telah menggunakan SIAK	17 jenis	17 jenis	100.00
12	Terlaksananya Survey IKM	Jumlah responden mengikuti Survey IKM	500 penduduk	500 penduduk	100.00
13	Terciptanya inovasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	6 jenis	6 jenis	100.00

14	Terlaksananya kerjasama dengan SKPD lainnya	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10 SKPD	1 SKPD	10.00
15	Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan pada SKPD lainnya	Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	2 SKPD	0 SKPD	0.00
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.518.949.000,-					
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.217.317.632,-					

Paringin, Januari 2020
Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Balangan



HIFZIANI, S.Pt.MH.
NIP. 196310301986031010